



**ARAHAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

**KEBIJAKAN
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
2015-2019**

**RAPAT KONSULTASI NASIONAL
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
TAHUN 2015 TAHAP I**

Padang, 16 Maret 2015



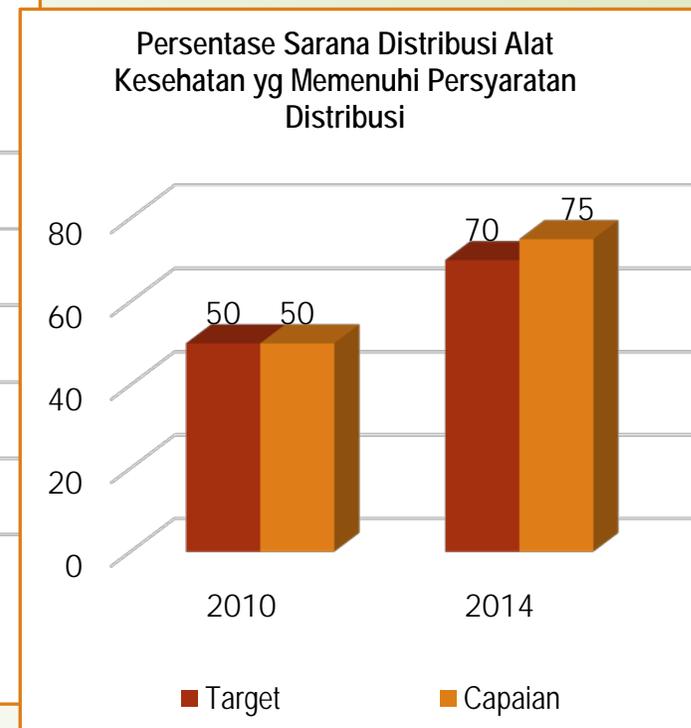
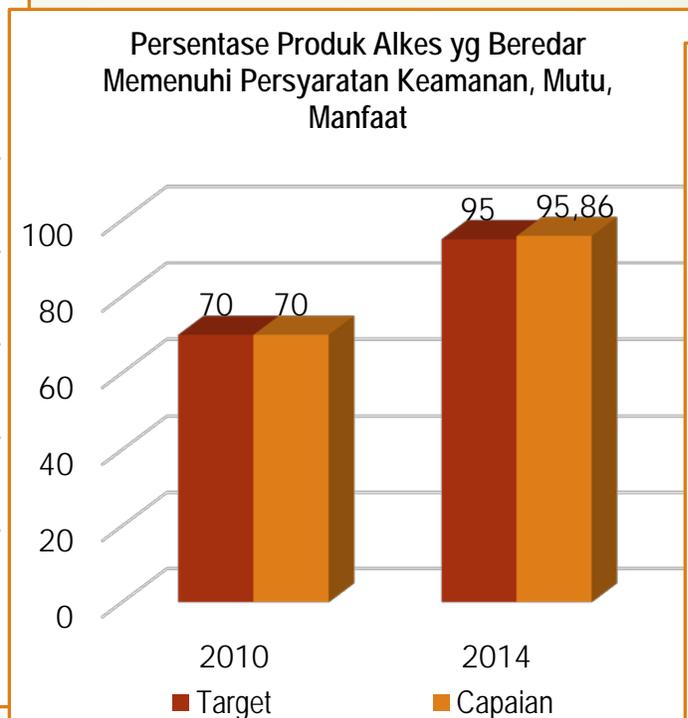
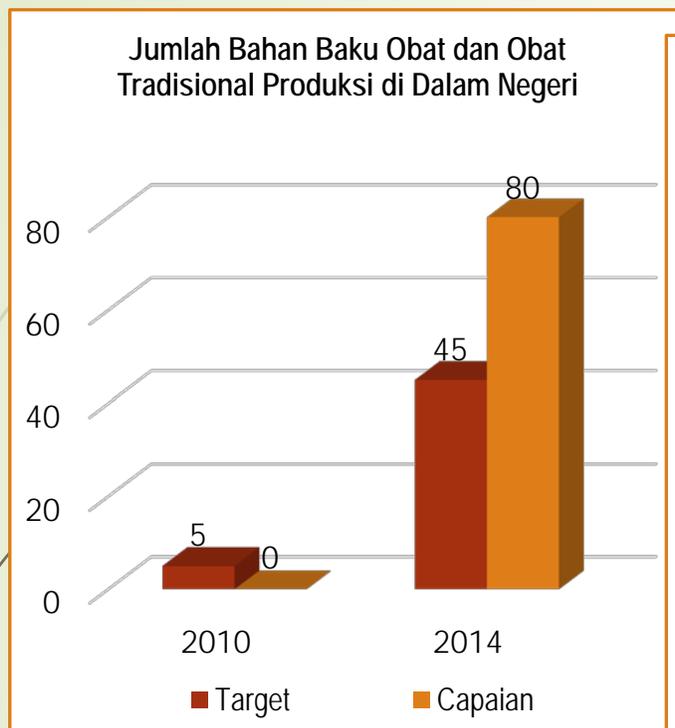
MUATAN ARAHAN

1. *KONDISI UMUM & CAPAIAN PROGRAM 2010 – 2014*
 2. *TANTANGAN PROGRAM DI PERIODE 2015-2019*
 3. *ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 2015 – 2019*
 4. *PERAN SERTA DINKES PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*
- 



**1. KONDISI UMUM & CAPAIAN
PROGRAM 2010-2014**

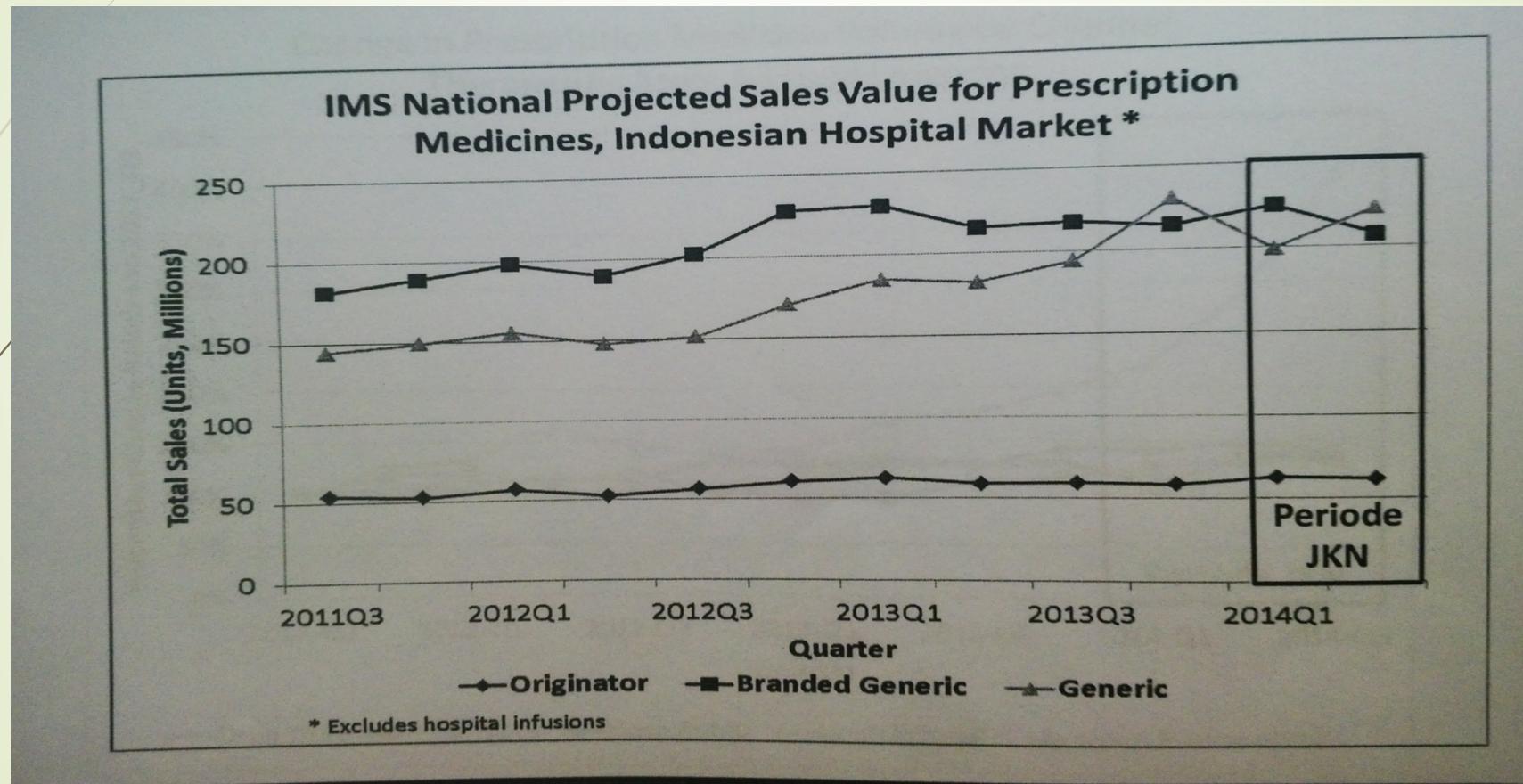
Produksi dan Distribusi: Sediaan Farmasi & Alat Kesehatan



- Sediaan farmasi, alkes, dan PKRT yang beredar terdaftar
- Peran industri domestik dalam pasar Alkes hanya 15%
- Peningkatan pengembangan produksi BBO dalam negeri
- Lembaga pengawasan pre dan post market alkes PKRT diperkuat



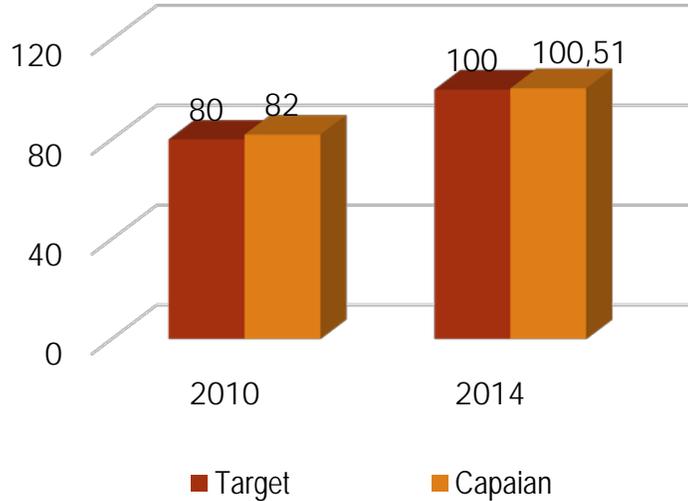
Penurunan Volume Obat Bermerek dan Peningkatan Volume Obat Generik dalam Audit RS IMS sejak 2013, dengan indikasi adanya Dampak Positif dari JKN



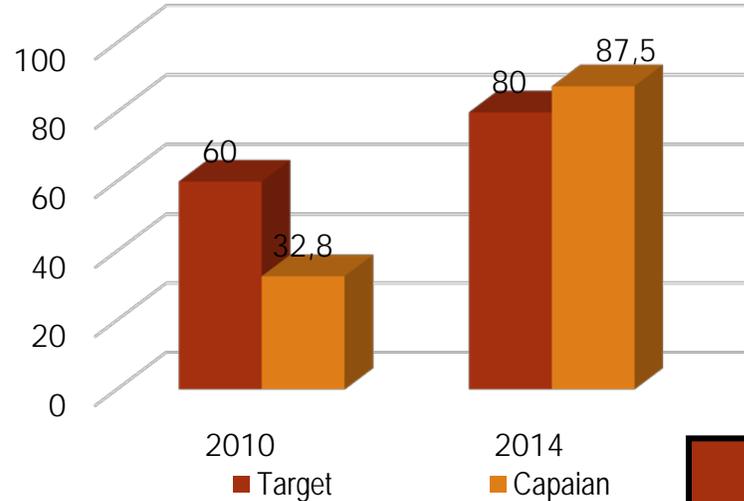
Data : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2014

Manajemen Logistik Obat dan Perbekkes

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin



Persentase IFK sesuai Standar



% KETERSEDIAAN OBAT PER REGION, B12 2014



Manajemen Ketersediaan Obat-Vaksin

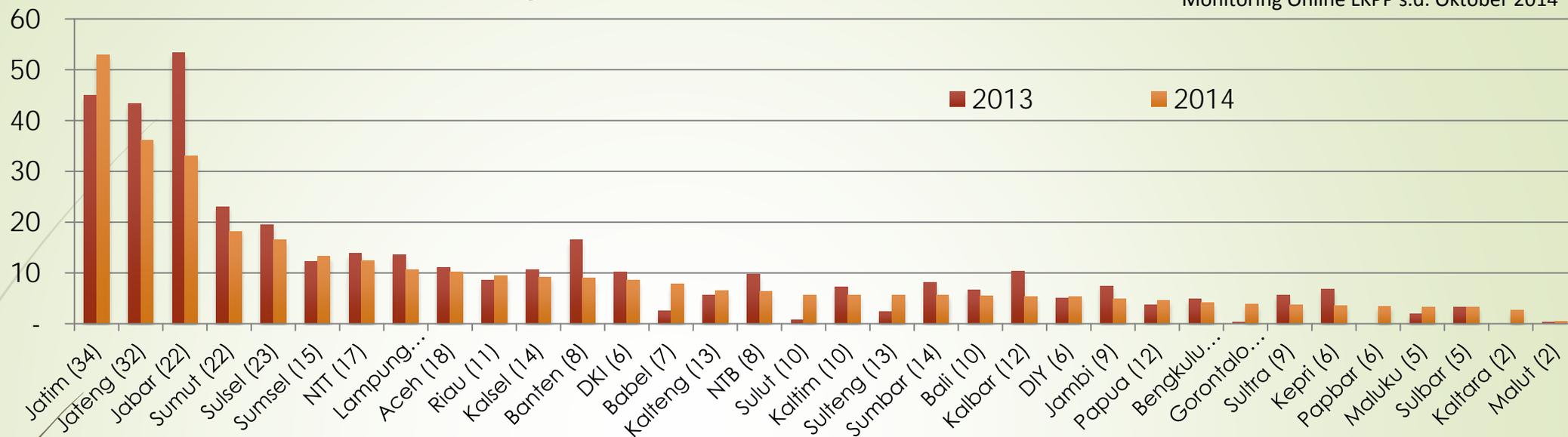
- Ketersediaan nasional mencukup
- Ketersediaan di tingkat provinsi bervariasi muncul kesenjangan

Penguatan Institusi distribusi

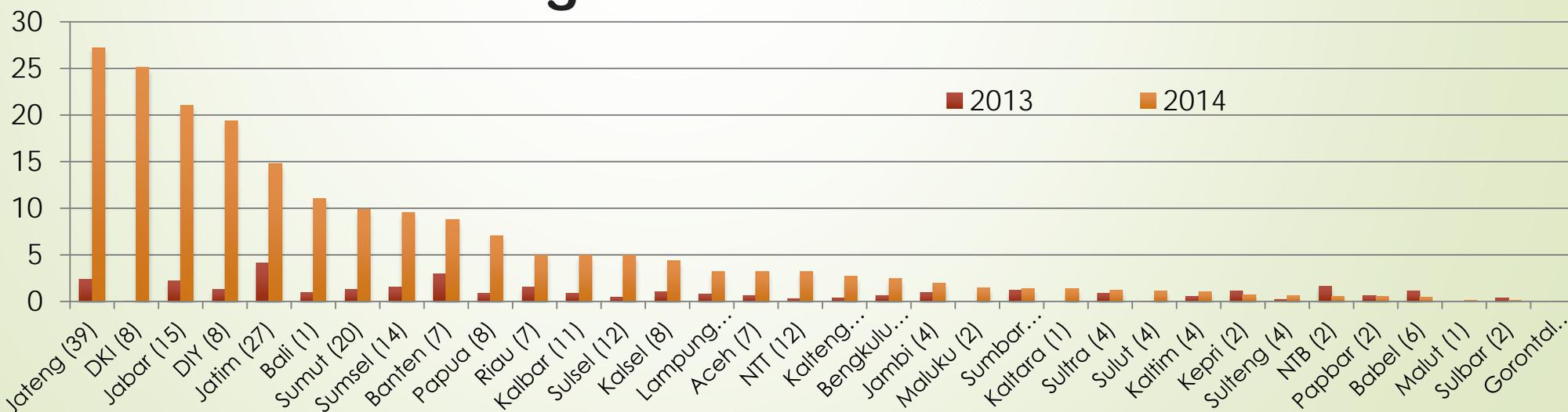
- ✓ Manajemen *supply chain*
- ✓ Sistem informasi harga, ketersediaan, pembelian, & konsumsi obat
- ✓ Pengendalian harga obat
- ✓ Optimalisasi sistem E-Catalog

Realisasi e-Purchasing Obat: Dinkes

*Milyar Rp.,
Monitoring Online LKPP s.d. Oktober 2014

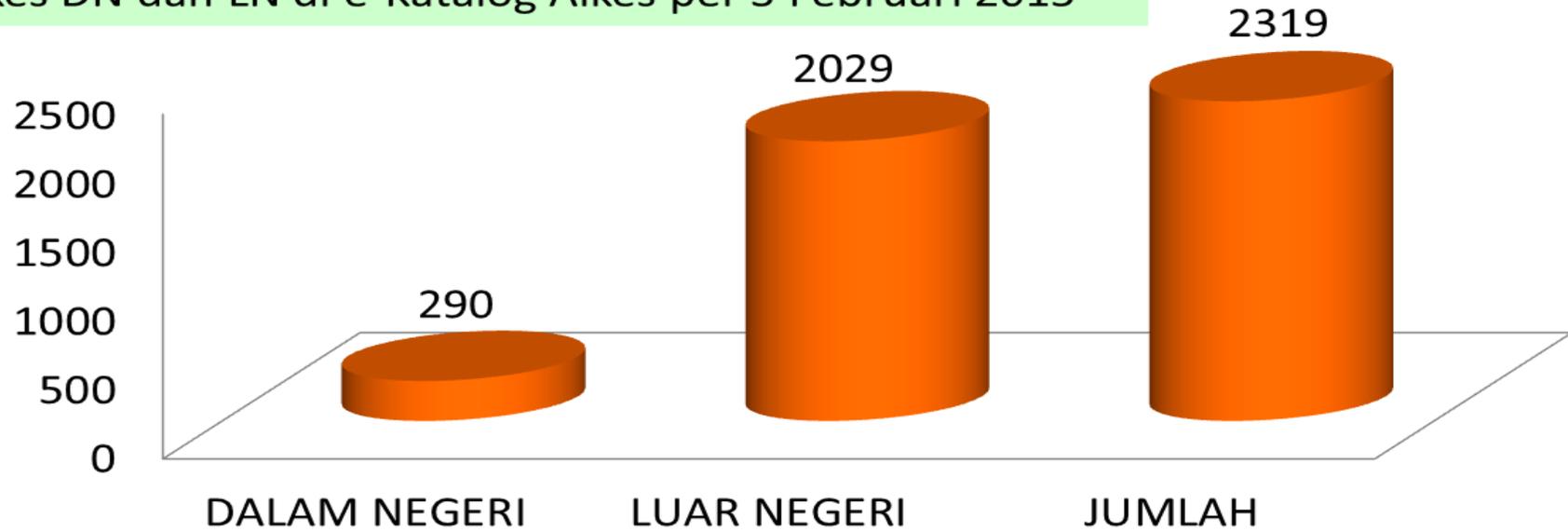


Realisasi e-Purchasing Obat: Rumah Sakit

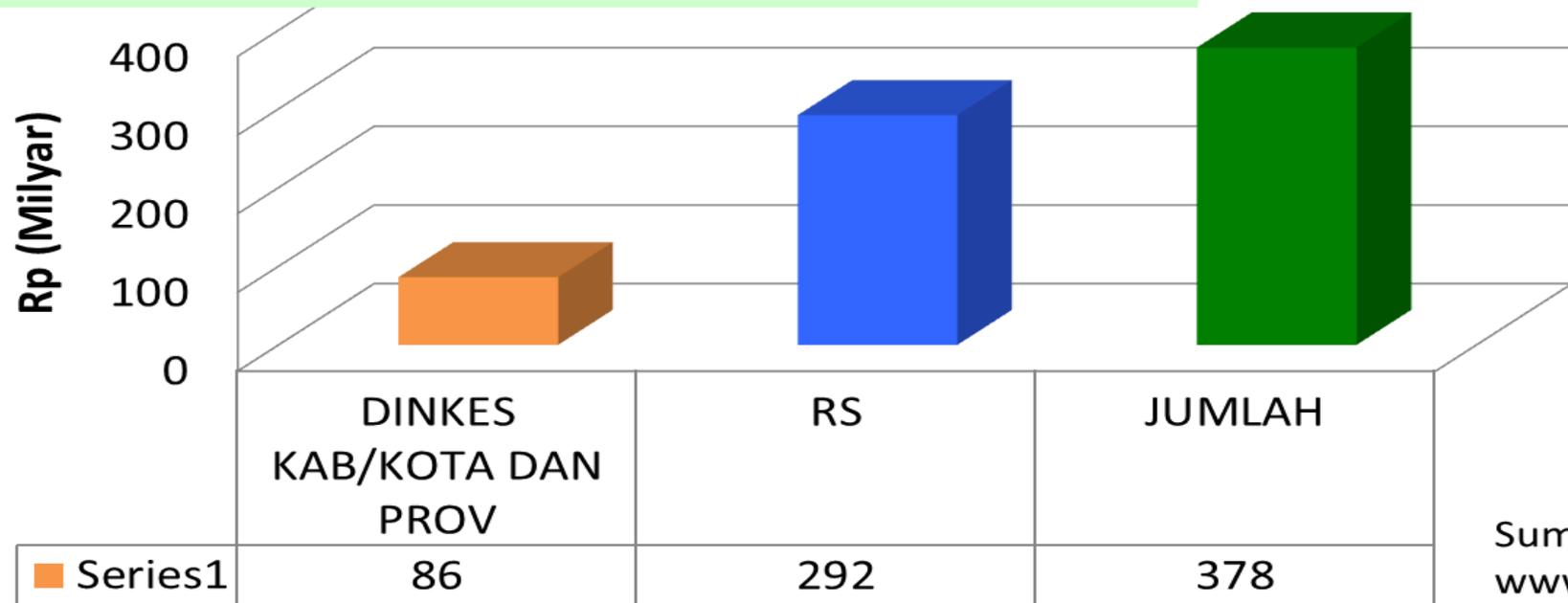


E-Purchasing: Pengadaan dgn E-Catalogue Obat & kontrak melalui SPSE LKPP

Jumlah Alkes DN dan LN di e-Katalog Alkes per 3 Februari 2015



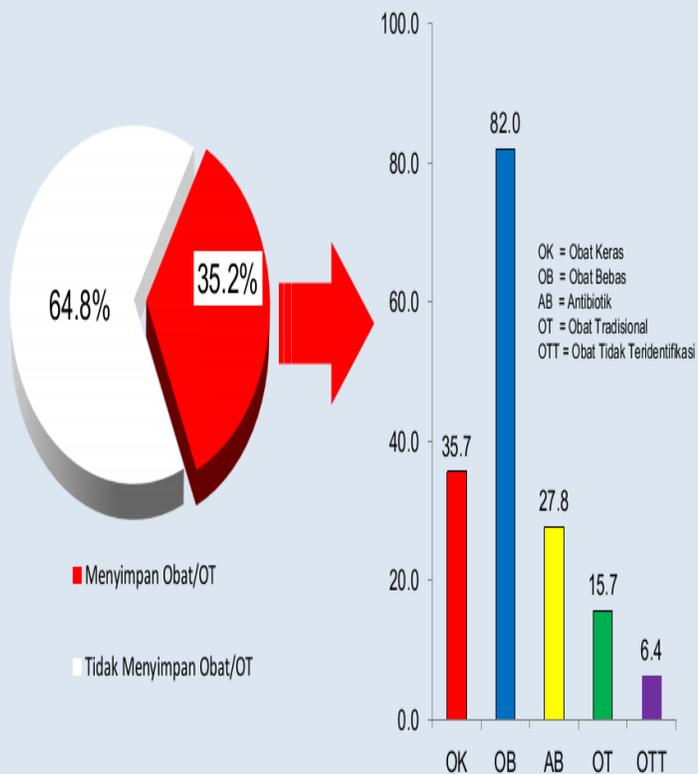
Nilai Transaksi Alkes melalui e-Katalog Alkes Per Januari 2015



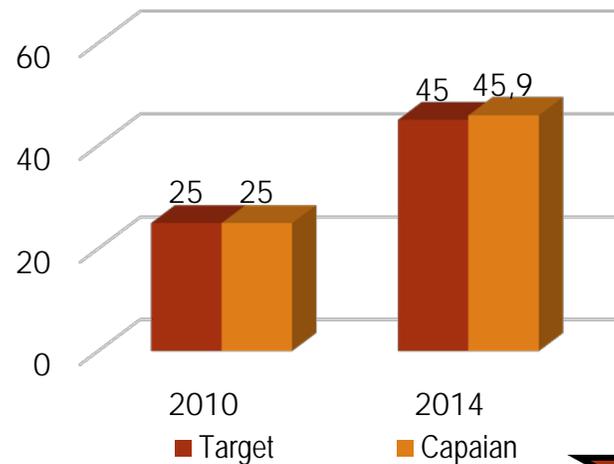
Sumber:
www.lkpp.go.id

Pelayanan Kefarmasian & Penggunaan Obat Rasional

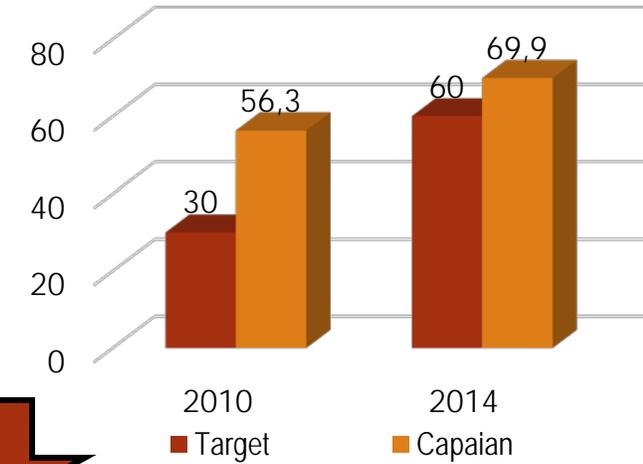
Proporsi RT yang Menyimpan Obat dan Jenis Obat yang Disimpan, 2013



Persentase IFRS yg Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar



Persentase POR pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah



Pelayanan Kefarmasian

- Mutu pelayanan kefarmasian masih rendah
- Pemanfaatan sumber dana APBN/APBD/kapitasi utk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan farmasi di lingkungan dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan

Promosi Penggunaan Obat

- ✓ Penggunaan obat rasional terutama obat generik masih rendah, pemahaman penduduk terkait obat generik masih rendah
- ✓ Pemberdayaan masyarakat untuk pengobatan rasional



2. TANTANGAN PROGRAM 2015-2019

Program Indonesia Sehat

PROGRAM INDONESIA SEHAT

1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat shg terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

PARADIGMA SEHAT

Program

- Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan
- Prom prev sebagai pilar utama upaya kesehatan
- Pemberdayaan masyarakat

Indikator

- Kota Sehat
- Kecamatan Sehat

PENGUATAN YANKES

Program

- Peningkatan Akses
- Peningkatan Mutu
- Regionalisasi Rujukan

Intervensi berbasis risiko Kesehatan (health risk)

Penerapan pendekatan Continuum of care

Indikator

- Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi
- Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi

JAMINAN KES NASIONAL

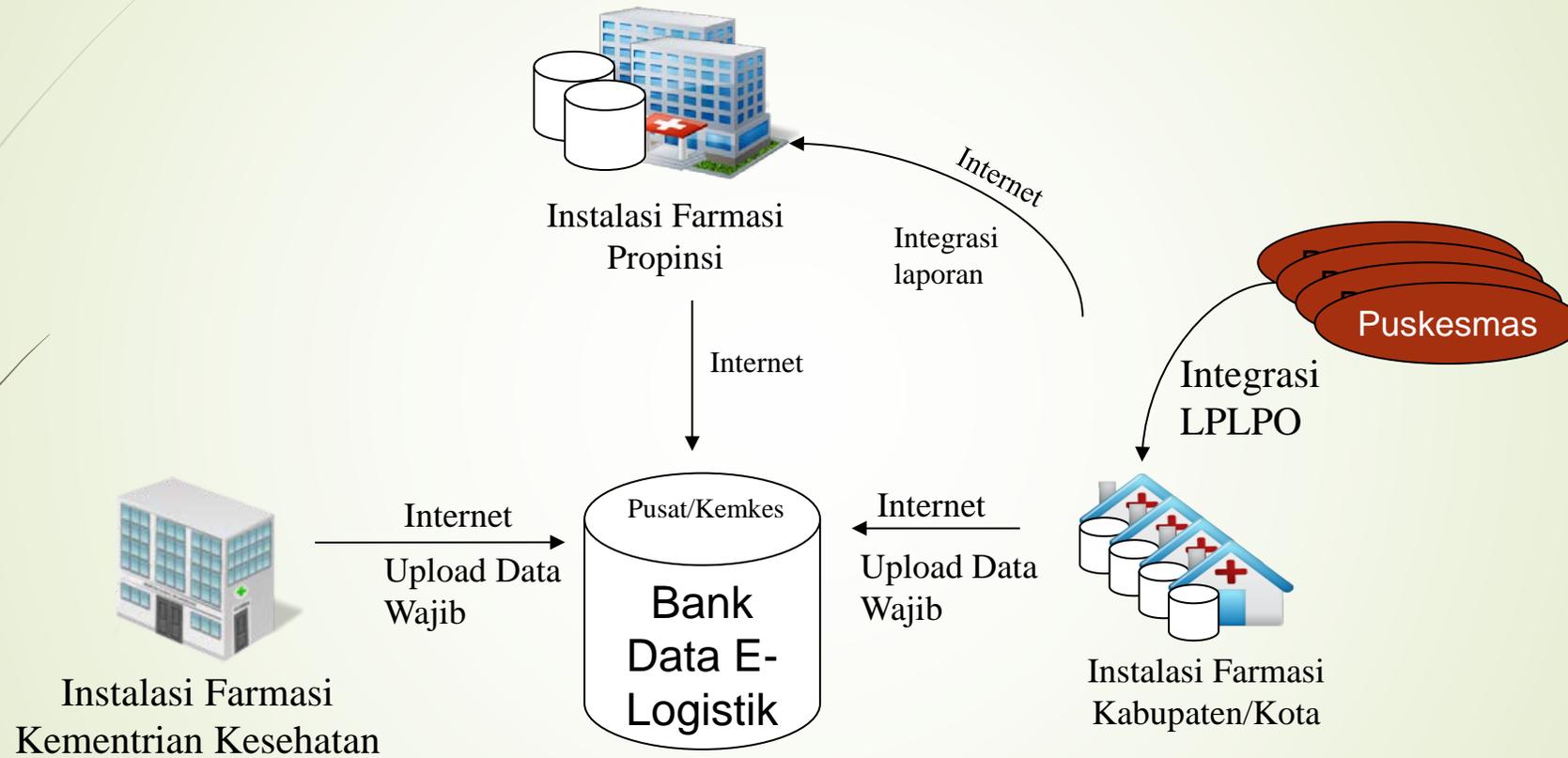
Program

- Benefit
- Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong
- Kendali Mutu dan Kendali Biaya
- Sasaran: PBI dan Non PBI

Indikator:

Total coverage

PENYEMPURNAAN E-LOGISTIK: MONITORING KETERSEDIAAN



Koordinasi dengan Pusdatin dan Dinkes

Tantangan Program utk Pilar Paradigma Sehat: Peran Tenaga Kefarmasian dlm Upaya Promotif- Preventif

- ✓ **Tinjauan terapi berbasis bukti** ; membantu menghilangkan disparitas dalam pelayanan kesehatan
- ✓ **Pencegahan Penyakit dan Peningkatan keamanan penggunaan obat** melalui program rekonsiliasi obat, pengkajian resep
- ✓ **Edukasi masyarakat**, melalui program edukasi mengenai penggunaan obat yang efektif dan aman
- ✓ Melaksanakan **Kebijakan Obat Nasional**, termasuk penetapan ketersediaan obat esensial
- ✓ **Riset dan Training** terutama di bidang keamanan penggunaan obat, farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, kualitas hidup pasien dan penggunaan obat berbasis bukti.

Tantangan Program utk Pilar Pelayanan Kesehatan

FOKUS:

Orientasi manusia

Basis tim pelayanan kesehatan

Resiko produk thd kesehatan

Sasaran:

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal dan Keselamatan Pasien

KOORDINASI LINTAS PROGRAM & SEKTOR

Penguatan manajemen obat & perbekkes di fasilitas kesehatan & IFK-IFP

Peningkatan POR & Swamedikasi

Peningkatan Kapasitas SDM

Penyusunan FORNAS dan DOEN

Revitalisasi Pelayanan Kefarmasian

Pengawasan pra dan pasca pemasaran alat kesehatan

Monitoring dan Evaluasi Program Kefarmasian & Alat Kesehatan

PENINGKATAN AKSES, KEMANDIRIAN, DAN MUTU SED.FARMASI ALAT KESEHATAN

Program Nusantara Sehat



www.nusantarasehat.kemkes.go.id
twitter: @nusantara_sehat
facebook: Nusantara Sehat

"Nusantara Sehat"

- Intervensi berbasis-tim di layanan kesehatan primer
- 44 Kabupaten, 120 Puskesmas

DTPK

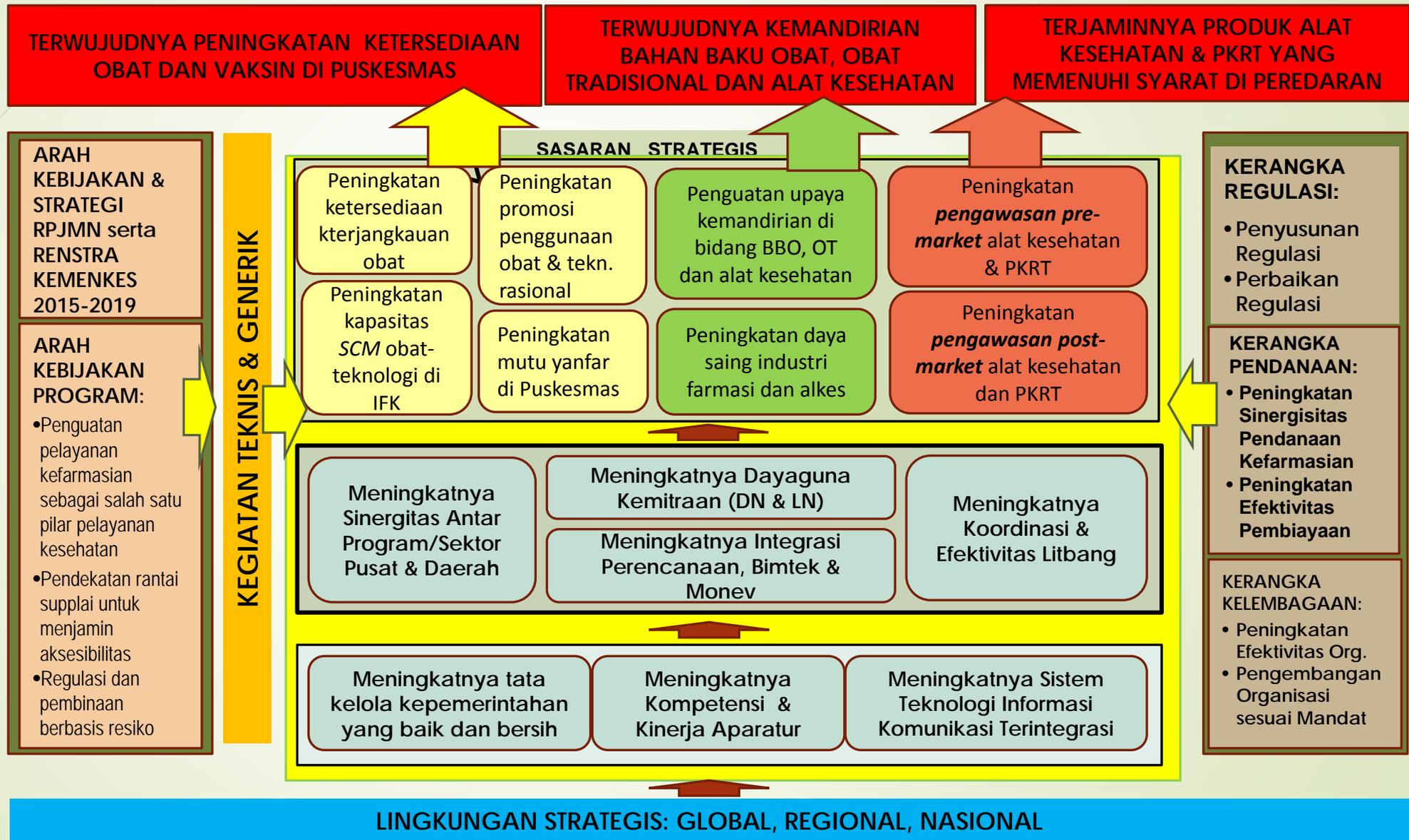
Tahun	Jml Prov	Jml Kab/ Kota	Jml Puskesmas	Jml Nakes (K)
2015	16	44	120	960
2016	17	54	130	1040
2017	18	59	140	1120
2018	19	64	150	1200
2019	20	69	160	1280

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan (preventif, promotif, dan kuratif) dengan melibatkan lima jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, ditambah dukungan dari dua tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga kesehatan gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga analis kesehatan/ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat yang akan ditempatkan ke pelosok nusantara.



3. ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 2015-2019

Peta Strategi Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan



TUJUAN 1: TERWUJUDNYA KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS

STRATEGI	INDIKATOR	KELEMBAGAAN	REGULASI
<p>1. Mewujudkan Instalasi Farmasi Nasional sebagai center of excellence manajemen pengelolaan obat, vaksin, dan perbekkes di sektor publik</p>	<p>1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas</p>	<p>Fungsi regulasi:</p> <p>1. Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes</p> <p>2. Dit. Bina Pelayanan Kefarmasian</p>	<p>1. RUU Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</p> <p>2. RUU Psikotropika</p> <p>3. RPM Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor</p>
<p>2. Memperkuat tata laksana Health Technology Assessment (HTA) dan pelaksanaannya dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN</p>	<p>2. Persentase instalasi farmasi Kab/Kota yg melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai standar</p>	<p>Fungsi implementasi:</p> <p>1. Instalasi Farmasi Nasional</p> <p>2. Instalasi Farmasi Provinsi</p> <p>3. Instalasi Farmasi Kab/Kota</p>	<p>4. RPM Peredaran, Penyimpanan, dan Pemusnahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi</p>
<p>3. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan</p>	<p>3. Persentase puskesmas yg melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar</p>	<p>4. Instalasi Farmasi RS</p> <p>5. Puskesmas</p> <p>6. Tim HTA Kemenkes</p> <p>7. Komnas FORNAS</p> <p>8. Komnas DOEN</p>	<p>5. RSKM Tim Harga Obat</p> <p>6. RPM Manajemen Logistik Obat Satu Pintu</p> <p>7. RSKM Pedoman Pengelolaan Obat di Instalasi Pemerintah</p>
<p>4. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis</p>	<p>4. Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas</p>	<p>Fungsi pengawasan:</p> <p>1. Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes</p> <p>2. Dit. Bina Pelayanan Kefarmasian</p>	<p>8. RSKM Formularium Nasional (revisi)</p> <p>9. RPM Pedoman Penggunaan Antibiotik</p> <p>10. RPM Perubahan Penggolongan Obat Nasional (DOEN)</p>
<p>5. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monev</p>			<p>11. RSKM Peta Jalan Pelayanan Kefarmasian di FKTP</p>

TUJUAN 2:

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT, OBAT TRADISIONAL DAN ALAT KESEHATAN

STRATEGI	INDIKATOR	KELEMBAGAAN	REGULASI
1. Menyusun regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku obat dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional	1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)	Fungsi regulasi: 1. Dit. Bina Prodis Kefarmasian 2. Dit. Bina Prodis Alkes (reorganisasi)	1. RUU Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
2. Mengembangkan Pokja ABGC dalam pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional, dan alat kesehatan dalam negeri	2. Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri (kumulatif)	Fungsi implementasi: 1. Dit. Bina Prodis Kefarmasian 2. Dit. Bina Prodis Alkes (reorganisasi)	2. RUU Psikotropika
3. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan	3. Jumlah alkes yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)	3. Pokja ABGC	3. RPM Industri Farmasi (Revisi)
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau		Fungsi pengawasan: 1. Dit. Bina Prodis Kefarmasian	4. RSKM Tim Penyusun dan Pemberlakuan Farmakope Indonesia Edisi V Suplemen 2
5. Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis masa patennya		2. Badan POM 3. Dit. Bina Prodis Alkes (reorganisasi)	5. RSKM Tim Penyusun dan Pemberlakuan Farmakope Herbal Indonesia Edisi II: 6. RSKM Tim Penyusun dan Pemberlakuan Farmakope Indonesia Edisi V Suplemen 3

TUJUAN 3:

TERJAMINNYA PRODUK ALAT KESEHATAN & PKRT YANG MEMENUHI SYARAT DI PEREDARAN

STRATEGI	INDIKATOR	KELEMBAGAAN	REGULASI
1. Menyusun regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan serta PKRT	1. Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	Fungsi regulasi: 1. Dit. Bina Prodis Alkes	1. RUU Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
2. Menyusun regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat kesehatan dalam negeri	2. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)	Fungsi implementasi: 1. Dit. Bina Prodis Alkes 2. Rumah Sakit 3. Dit. Bina Penunjang Medik 4. BPFK	2. RPM Pedoman Toko Alkes 3. RPM Pedoman Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan PKRT 4. RPM Pengawasan Alkes dan PKRT 5. RPM Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)
3. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan	3. Persentase penilaian pre market tepat waktu sesuai Good Review Practices	Fungsi pengawasan: 1. Dit. Bina Prodis Alkes	6. RPM Pedoman Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik dan Petunjuk Teknis CPAKB 7. RPM Pedoman Sistem e-Monitoring Post Market dan Surveillance Alkes dan PKRT 8. RPM Izin Edar Alkes & PKRT 9. RPM Produksi Alkes & PKRT 10. RPM Izin Penyaluran Alkes



4. PERAN SERTA DINAS KESEHATAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

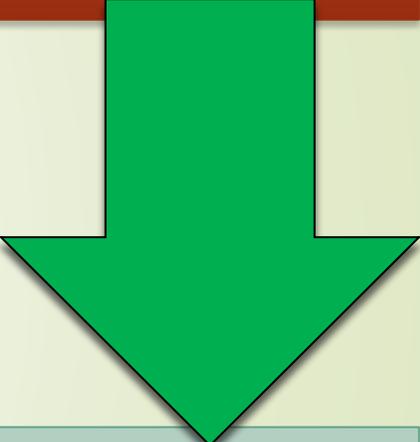
Pelaksanaan Amanat UU 23/2014



Urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintah konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota

KETERSEDIAAN OBAT:

- Pusat: Obat Program Nasional
- Pemda : Obat PKD dan obat program Nasional (dalam kondisi tertentu)



PROGRAM KEFARMASIAN & ALAT KESEHATAN:

- Pusat: NSPK, TOT, Monev, Binwas
- Pemda Provinsi: NSPK, TOT, Monev, Binwas
- Pemda Kab/Kota: Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan sarana dan prasarana, monev

Perkuat Koordinasi Lintas Program & Sektor

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT PERAN APT (2015-2019)
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi (350-5.600)
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi (233-477)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (2.700-4.700)
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) : <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Obat - Mutu Pelayanan Kefarmasian - Penggunaan Obat Rasional 	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (77-90)
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (50-70)
		Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas (77-90)



HARAPAN KEPADA DINAS KESEHATAN

- Menjadi **PERWAKILAN PUSAT** dalam pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah, terutama **DALAM KERJA SAMA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR** → Perlunya **PEMAHAMAN KOMPREHENSIF** tentang Program dan **SINERGI** dengan program kesehatan di daerah
- Menjadi **FASILITATOR PENGUMPULAN** dan **VALIDASI DATA CAPAIAN PROGRAM**, terutama yang bersumber dari Puskesmas/sarana pelayanan kesehatan → Perlunya **KOMPETENSI, PERANGKAT PENDUKUNG**, serta **KOMITMEN PELAPORAN**
- Menjadi **SUMBER IDE** dan **MITRA DISKUSI** pengembangan program → Perlunya **PENGEMBANGAN KARAKTERISTIK DAERAH** dan akomodasinya dalam pelaksanaan Program (mis. DTPK)
- Menjadi **KONTRIBUTOR** dalam upaya pencapaian **TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN NEGARA YANG BAIK DAN BENAR** di lingkup Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan → Perlunya **PENGETAHUAN** serta **PEMAHAMAN** tata kelola pemerintahan dan keuangan negara
- Melaksanakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan **KINERJA BAIK**



**PEMBUKAAN RAPAT KONSULTASI NASIONAL
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
TAHUN 2015
TAHAP 1 (BARAT)**



Terima kasih.